

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN SIZE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**Samino Hendrianto¹**¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang¹Samhendrin75@gmail.com

Keyword	Abstract
<i>Tax Avoidance, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Board Of Commissioners, Audit Committee</i>	<i>The purpose of this study was to determine the effect of institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, and audit committees on tax avoidance with Size Perusahaan as a moderating variable in food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research time period used is 5 years, namely the 2017-2021 period. The sampling technique used purposive sampling technique. Based on the predetermined criteria, 17 companies were obtained. The type of data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange website. The analytical method used is panel data regression analysis. The results show that institutional ownership has a negative effect on tax avoidance, managerial ownership has a positive effect on tax avoidance and the independent board of commissioners has a negative effect on tax avoidance. The audit committee has no effect on tax avoidance, and institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, and audit committees jointly affect tax avoidance.</i>

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut UU No 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak, output dari pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukarta, 2014).

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya adalah pajak (Diantari dan Agung, 2016). Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dari Rp 2.030,7 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.643 triliun berasal dari penerimaan pajak (BPS, 2020). Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan pemerintah melakukan perubahan dimulai awal tahun 1984, pada tahun ini sistem perpajakan di Indonesia berubah

menjadi *self assesment system* dari yang sebelumnya adalah *official assesment system*. Di dalam *official assesment system* pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan pajak, sebaliknya di dalam *self assesment system* wajib pajak sendiri yang bertanggungjawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang ke kantor pelayanan pajak (KPP), (Pajak.go.id).

Di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Salah satu hal yang menyebabkan *tax avoidance* adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia yang masih menggunakan *Self Assesment System*, sehingga memberikan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Salamah, 2018). Tujuan *tax avoidance* ialah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah- celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba. Oleh karena itu, *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran atas perundang- undangan perpajakan atau secara etik dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak yang dimungkinkan oleh undang – undang pajak.

Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan *tax avoidance* (Pratomo dan Rana, 2021).

Kepemilikan institusional yang tinggi atas saham suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. Pengukuran ini juga dilakukan pada penelitian (Rahmawati et al., 2016). Kepemilikan institusional mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan agar dalam menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kinerja perusahaan yang meningkat akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham berupa deviden. Hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan Mahulae (2016), menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Manajerial memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profit perusahaan, sehingga manajerial mampu melaksanakan tanggung jawabnya mendapatkan imbalan dan bonus atas kinerjanya dibandingkan dengan deviden saham manajerial yang tergolong kecil tidak akan menghalangi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang disebut *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan Mahulae (2016), menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga dewan komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*. Menurut penelitian (Rachmawati, 2020), dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dewan komite audit yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam memberi nasehat profesional yang independen untuk mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Jadi jika semakin padatnya pengawasan maka kinerja yang dihasilkan akan semakin bermutu. Komite audit juga mempunyai wewenang yaitu dapat menghindari berbagai sifat yang tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Menurut (Rospitasari & Oktaviani, 2021) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya peningkatan jumlah anggota komite audit tampaknya dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Oliviana dan Muid, 2019) komite audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* karena mungkin saja dewan komisaris dapat menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini sehingga makin bertambahnya jumlah komite audit, justru makin memperparah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Sebagai moderasi hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, *Size Perusahaan* adalah skala besar kecilnya sebuah

perusahaan yang dapat dilihat dari total aktivitya pada akhir periode. Semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin besar pula tuntutan akan keterbukaan informasi sehingga perusahaan akan cenderung lebih hati-hati dan menghindari penyimpangan tata kelola perusahaan (Purbowati, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (2) Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (3) Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (4) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?; (5) Apakah Size Perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?; (6) Apakah Size Perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan Manajerial terhadap *tax avoidance*?; (7) Apakah Size Perusahaan memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?; (8) Apakah Size Perusahaan memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*; (2) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*; (3) Untuk mengetahui pengaruh dean komisaris independen terhadap *tax avoidance*; (4) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*; (5) Untuk mengetahui pengaruh Size Perusahaan dalam memoderasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*; (6) Untuk mengetahui pengaruh Size Perusahaan dalam memoderasi kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*; (7) Untuk mengetahui pengaruh Size Perusahaan dalam memoderasi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*; (8) Untuk mengetahui pengaruh Size Perusahaan dalam memoderasi komite audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian adalah sebagai berikut: Pertama. **Manfaat Teoritis**; Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan pengembangan teori para peneliti, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kedua. **Manfaat Praktis**; (1) Bagi Penulis. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memperluas pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir penulis dalam hal penyelesaian masalah; (2) Bagi Perusahaan Makanan dan Minuman. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penilaian kinerja manajemen perusahaan yang dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya pajak dan risiko jika melakukan *tax avoidance*; (3) Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Jansen dan Meckling, 1976 (dalam Siregar, 2016) menyatakan bahwa teori agensi antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* adalah pemegang saham yang menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan *agent* adalah pengelola perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh pemegang saham kepadanya. *Principal* akan memperoleh hasil berupa pembagian deviden, sedangkan *agent* akan memperoleh gaji, bonus dan berbagai macam kompensasi lainnya. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan. Tetapi selain tujuan itu, seorang manajer mungkin memiliki tujuan lain yang bertentangan dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini akan menciptakan konflik kepentingan yang potensial terjadi dan konsep ini yang kemudian

disebut *agency theory* (Brigham dan Gapenski, 1996).

Perbedaan kepentingan antara *agents* dan *principal* dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun (Musyarrofah, 2017).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dengan para *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Ghazali dan Chariri, (2007) mengatakan bahwa: “Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful *stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Fokus teori *stakeholder* adalah mengacu pada pengambilan keputusan manajerial membuat perusahaan berusaha memberikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder* (Lasmaria, 2014). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholdernya* dengan mengakomodasi keinginan

dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghazali, 2007).

Penelitian Terdahulu

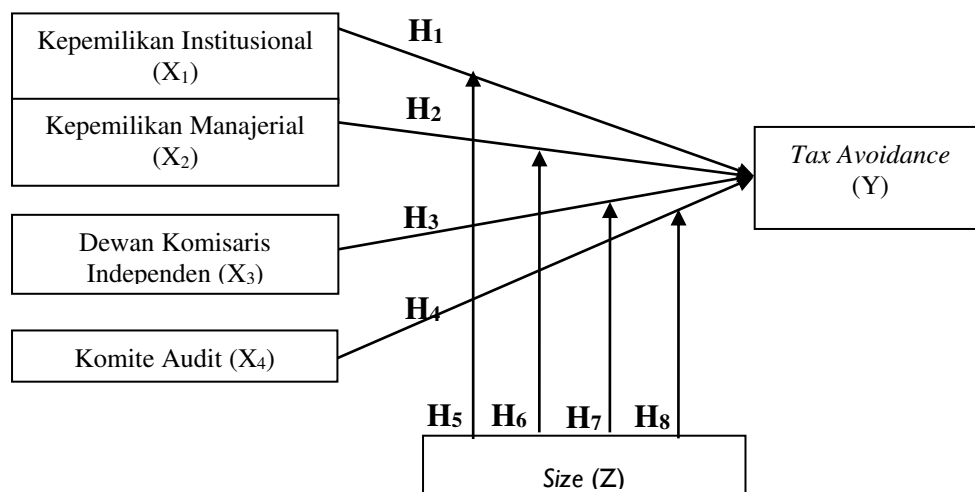
Menurut Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018), dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*” yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Rezia Bayu Charisma dan Susi Dwimulyani (2019), dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel *Moderating*” yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Marsinah (2021), dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

III. METODOLOGI

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021). Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan dengan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Kriteria perusahaan yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021; (2) Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang mempublikasikan laporan keuangan auditan secara konsisten selama periode 2017 – 2021; (3) Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang memiliki saham institusional selama periode 2017 – 2021; (4) Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang memiliki saham manajerial selama periode 2017 – 2021.

IV. HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	TA	KI	KM	DKI	KA	SIZE
Mean	0.246106	0.508284	0.187767	0.382144	0.529418	12.36681
Median	0.228800	0.556100	0.062500	0.333300	0.666700	12.12970
Maximum	6.934500	1.000000	0.838700	0.500000	0.666700	14.25370
Minimum	-1.840500	0.048400	0.008200	0.166700	0.333300	11.01430
Std. Dev.	0.811035	0.256096	0.238675	0.094051	0.165058	0.835790
Skewness	6.427546	-0.237159	1.510003	-0.035751	-0.358569	0.617653
Kurtosis	56.39021	1.844991	4.213221	2.031145	1.128571	2.979965
Jarque-Bera	10680.84	5.521539	37.51455	3.342597	14.22521	5.405946
Probability	0.000000	0.063243	0.000000	0.188003	0.000815	0.067006
Sum	20.91900	43.20410	15.96020	32.48220	45.00050	1051.179
Sum Sq. Dev.	55.25333	5.509145	4.785130	0.743037	2.288497	58.67774
Observations	85	85	85	85	85	85

Berdasarkan table diatas bahwa Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -1.840500 dan Nilai maksimum sebesar 6.934500. Nilai *mean* untuk variabel *tax avoidance* sebesar 0.246106 atau lebih kecil dari < 1 yang dapat menunjukkan bahwa 17 perusahaan sampel rata-rata melakukan praktik *tax avoidance*. Nilai median *tax avoidance* sebesar 0.228800 menunjukkan nilai tengah variabel *tax avoidance* jika diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian nilai standar deviasi (sebaran data) dari variabel *tax avoidance* adalah sebesar 0.811035 diatas nilai rata-rata, yang artinya bahwa variabel *tax avoidance* memiliki tingkat variasi data yang tinggi. Kepemilikan institusional memiliki nilai

minimum 0.048400 dan maximum sebesar 1. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.508284 yang dapat menunjukkan 17 perusahaan sampel memiliki rata-rata proporsi saham institusional sebesar 51%. Nilai median sebesar 0.556100 menunjukkan nilai tengah variabel kepemilikan institusional jika diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian nilai standar deviasi (sebaran data) sebesar 0.256096 dibawah nilai rata-rata, artinya variabel kepemilikan institusional memiliki tingkat variasi data yang rendah.

Rata-rata (*mean*) variabel kepemilikan manajerial (KM) 0.187767, nilai standar deviasi sebesar 0.238675 diatas nilai rata-rata, maka

dapat disimpulkan tingkat variasi data kepemilikan manajerial perusahaan tinggi. Nilai minimum 0.008200 dan Nilai maksimum sebesar 0.838700. nilai median 0.62500 yang menunjukkan nilai tengah variabel kepemilikan manajerial jika diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nilai rata-rata (*mean*) variabel dewan komisaris independen (DKI) 0.382144 menunjukkan 17 perusahaan sampel memiliki rata-rata dewan komisaris independen sebesar 38% dengan nilai median 0.333300 menunjukkan nilai tengah variabel dewan komisaris independen jika diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Nilai minimum sebesar 0.166700 Nilai maksimum dewan komisaris independen sebesar 0.500000, nilai standar deviasi sebesar 0.094051 lebih rendah dari pada nilai rata-rata (*mean*), maka dapat disimpulkan tingkat variasi data variabel dewan komisaris independen rendah. . Nilai rata-

rata (*mean*) variabel komite audit (KA) 0.529418, nilai median komite audit 0.666700, Nilai minimum sebesar 0.333300 yang menunjukkan bahwa 17 perusahaan sampel memiliki jumlah komite audit paling sedikit adalah 3 orang. Nilai maksimum sebesar 0.666700 yang menunjukkan bahwa 17 perusahaan sampel memiliki jumlah komite audit paling banyak 6 orang. nilai standar deviasi sebesar 0.165058 lebih rendah dari pada nilai rata-rata (*mean*), maka dapat disimpulkan tingkat variasi data variabel komite audit rendah. Nilai rata-rata (*mean*) variabel size 12.36681,. Nilai median 12.12970 menunjukkan nilai tengah variabel Size Nilai minimum sebesar 11.01430 Nilai maksimum sebesar 14.25370, nilai standar deviasi sebesar 0.835790 lebih rendah dari nilai rata-rata, maka tingkat variasi data ukuran perusahaan (*Size Perusahaan*) rendah.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

	TA	KI	KM	DKI	KA	SIZE
TA	1.000000	0.077889	0.047761	-0.153637	-0.024247	-0.013937
KI	0.077889	1.000000	-0.646570	-0.246953	-0.075631	-0.181607
KM	0.047761	-0.646570	1.000000	0.020081	-0.067105	0.207638
DKI	-0.153637	-0.246953	0.020081	1.000000	0.117309	0.112697
KA	-0.024247	-0.075631	-0.067105	0.117309	1.000000	-0.022047
SIZE	-0.013937	-0.181607	0.207638	0.112697	-0.022047	1.000000

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat >0.80 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi variabel independen yang memiliki nilai lebih dari Multikolinearitas dalam Model Regresi Data Panel.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	95.28441	136	0.1104
Pesaran scaled LM	-0.024190		0.7884
Bias-corrected scaled LM	-0.030190		0.5559
Pesaran CD	-0.863572		0.2178

Berdasarkan tabel diatas, nilai Prob. *Breusch-Pagan LM* lebih besar dari tingkat α 0.05 yaitu 0.1104 > 0.05 maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan

bahwa **tidak terjadi heteroskedastisitas** dalam model regresi.

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.647035	Mean dependent var	1.000000
Adjusted R-squared	0.584502	S.D. dependent var	0.000000
S.E. of regression	0.012816	Akaike info criterion	-8.213569

Sum squared resid	0.017859	Schwarz criterion	-7.538918
Log likelihood	398.8342	Hannan-Quinn criter.	-7.947790
F-statistic	12.65000	Durbin-Watson stat	1.901107
Prob(F-statistic)	0.000004		

Tabel 4. Uji F

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 12.65000 sementara *F* Tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df1(k-1) = 6-1 = 5$, dan $df2 (n-k) = 85-6=79$ didapat nilai *F* Tabel sebesar 2,33. Dengan demikian *F-statistic* (12.65000) > *F* Tabel (2,33) dan nilai Probabilitas *statistic* sebesar 0.000004 < 0,05 maka H_a diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan

komite audit secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil diatas menunjukan bahwa nilai koefisien Adjusted R-squared menunjukan nilai sebesar 0.584502, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya nilai *Tax Avoidance* dapat dijelaskan dengan kuat oleh dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit sebesar 58,45%, sementara sisanya yaitu sebesar 41,55% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.008006	0.000547	3.772856	0.0112
KI	-0.984520	0.002002	4.002568	0.0001
KM	0.889826	0.082568	3.805685	0.0105
DKI	-0.473832	0.176058	4.255865	0.0009
KA	-0.141788	0.256058	-2.192545	0.6624
KI*SIZE	0.083025	0.825658	2.285688	0.0017
KM*SIZE	0.070652	0.355825	-4.782565	0.2205
DKI*SIZE	0.036658	0.257875	0.988506	0.3301
KA*SIZE	0.011295	0.122458	-1.285456	0.0788

$$TA_{it} = 4.008006 - 0.984520KI + 0.889826KM - 0.473832DKI - 0.141788KA + 0.083025 + 0.070652 + 0.036658 + 0.011295 + \varepsilon_{it}$$

Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap *Tax Avoidance* (TA)

Hasil analisis untuk variabel Kepemilikan Institusional (KI) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (TA). Hal ini ditunjukkan oleh variabel (X1) dengan Nilai t-statistic Kepemilikan Institusional (KI) sebesar (4.002568), sementara t Tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df (n-k) = 79$ didapat nilai t-Tabel sebesar (1.99045). Dengan demikian *t-statistic* (4.002568) > t Tabel (1.99045) dan nilai Prob 0.0001 < 0.05 dengan

nilai koefisien sebesar -0.984520 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional (KI) dalam penelitian ini berpengaruh dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KI) terhadap *Tax Avoidance* (TA)

Hasil analisis untuk variabel Kepemilikan Manajerial (KM) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (TA). Hal ini ditunjukkan

oleh variabel (X_2) dengan Nilai *t-statistic* Kepemilikan Institusional (KI) sebesar (3.805685), sementara *t* Tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df (n-k) = 79$ didapat nilai *t*-Tabel sebesar (1.99045). Dengan demikian *t-statistic* (3.805685) > *t* Tabel (1.99045) dan nilai Prob 0.0105 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.889826 maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial (KM) dalam penelitian ini berpengaruh dengan arah positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI) terhadap *Tax Avoidance* (TA)

Hasil analisis untuk variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (TA). Hal ini ditunjukkan oleh variabel (X_3) dengan Nilai *t-statistic* Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar (4.255865), sementara *t* Tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df (n-k) = 79$ didapat nilai *t*-Tabel sebesar (1.99045). Dengan demikian *t-statistic* (4.255865) > *t* Tabel (1.99045) dan nilai Prob 0.0009 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar -0.473832 maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) dalam penelitian ini berpengaruh dengan arah negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap *Tax Avoidance* (TA)

Hasil analisis untuk variabel Komite Audit (KA) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (TA). Hal ini ditunjukkan oleh variabel (X_4) dengan Nilai *t-statistic* Komite Audit (KA) sebesar (-2.192545), sementara *t* Tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$, $df (n-k) = 79$ didapat nilai *t*-Tabel sebesar (1.99045). Dengan demikian *t-statistic* (-2.192545) < *t* Tabel (1.99045) dan nilai Prob 0.6624 > 0.05 dengan nilai koefisien sebesar -0.141788 maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Komite Audit (KA) dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Size Perusahaan mampu memoderasi hubungan variabel Kepemilikan

Institusional (KI) terhadap *Tax Avoidance* (TA)

Hasil analisis menyatakan bahwa Size Perusahaan mampu memoderasi pengaruh variabel Kepemilikan Institusional (KI) terhadap *Tax Avoidance* (TA) karena dalam penelitian ini memiliki *t-statistic* (2.285688) > *t*-tabel (1.99045) dan nilai Prob. 0.0017 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Size Perusahaan dalam penelitian ini mampu memoderasi pengaruh variabel Kepemilikan Institusional (KI) terhadap *Tax Avoidance* (TA). Dari hasil tersebut maka dikatakan bahwa H_5 terbukti atau diterima.

Size Perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Tax Avoidance* (TA)

Hasil analisis menyatakan bahwa Size Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Tax Avoidance* (TA) karena dalam penelitian ini memiliki *t-statistic* (-4.782565) < *t*-tabel (1.99045) dan nilai Prob. 0.2205 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Size Perusahaan dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Tax Avoidance* (TA). Dari hasil tersebut maka dikatakan bahwa H_6 tidak terbukti atau ditolak.

Size Perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) terhadap *Tax Avoidance* (TA)

Hasil analisis menyatakan bahwa Size Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Tax Avoidance* (TA) karena dalam penelitian ini memiliki *t-statistic* (-4.782565) < *t*-tabel (1.99045) dan nilai Prob. 0.2205 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Size Perusahaan dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Tax Avoidance* (TA). Dari hasil tersebut maka dikatakan bahwa H_6 tidak terbukti atau ditolak.

Size Perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel Komite Audit (KA) terhadap Tax Avoidance (TA)

Hasil analisis menyatakan bahwa Size Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) terhadap Tax Avoidance (TA) karena dalam penelitian ini memiliki $t\text{-statistic } (0.988506) < t\text{-tabel } (1.99045)$ dan nilai Prob. $0.3301 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Size Perusahaan dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Dari hasil tersebut maka dikatakan bahwa H_7 tidak terbukti atau ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap tax avoidance, komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Size Perusahaan mampu memoderasi pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, Size Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance, Size Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel dewan komisaris independen terhadap tax avoidance, Size Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel komite audit terhadap tax avoidance.

Saran

Bagi Perusahaan: Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance. Kepemilikan institusional dan adanya dewan komisaris independen yang terbukti mempengaruhi tax avoidance perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya tindakan tax avoidance dalam perusahaan.

Bagi Peneliti Selanjutnya: (1) Sebaiknya menambahkan variabel independen lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance seperti profitabilitas, capital intensity, dan

leverage; (2) Diharapkan menganalisis pada sektor lain diluar sektor makanan dan minuman, seperti sektor manufaktur atau sektor keuangan. Hal tersebut bermaksud agar diperoleh gambaran dan dapat membandingkan mengenai tindakan tax avoidance yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI); (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan sehingga hasil penelitian dapat di generalisasikan serta untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida ayu. 2018. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.
- Ardyansah, D.& Zulaikha. (2018). *Pengaruh Size Perusahaan, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komite Audit terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Darmawan, I Gede Hendy dan Sukartha, I Made. 2017. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9 (1), pp: 143-161.
- Dewinta, I. A. R. dan Setiawan, P. E. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.14, (No. 3), hal 1584-1613.
- Diantari, Putu Rista dan Ulupui, IGK Agung. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. E-journal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.1 Juli (2016): 702-732. ISSN: 2302-8556.
- Eksandy. (2018). *Metode Penelitian Akuntansi Dan Manajemen* (Muhammad Zulman Hakim (ed.)). FEB UMT.
- Fenny Winata. 2019. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada*

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. Tax & Accounting Review (Vol. 4, No.1, 2019)

Fitria, G. N. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 11(3), 438–451

Ginting, S. (2016). *Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 6(2), 167-168

Jasmine, Ulfa 2017. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)*. JOM Fekon Vol.4 No.1

Krisna, A. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi, 18(2), 82–91.

Pratomo, D., & Rana, R. A.. (2021). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1).

Purbowati, Rachyu. 2021. “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*.” 4(1):61–76.

Salamah, R. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.

Setiawan , Desy Amaliati; Wasif , Said Khaerul; Husen , Irfan Arif; Yuliansyah , Rahmat; Pebriani , Wanda. 2021. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal inovasi penelitian : Vol 2 No 1.

Sinambela, T. (2019). *Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 1, 68–86.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Syuhada, Anggi., Yusraini., & Meirawati, Eka. 2019. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi. Vol 13.

Wijayani, R. D. (2016). *Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 181-192.

www.idx.co.id